



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Rabu, 8 Juli 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI



BRANDING PRODUK: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana saat meninjau stan UMKM milik Dinas Koperasi dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sidoarjo, Selasa (7/7).

Wabup Dorong UMKM Kuasai Per

Agar Tembus
Pasar Nasional dan
Internasional

Kemampuan menguasai dan
memanfaatkan teknologi

KOTA-Transformasi digital kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dipenuhi agar produk lokal mampu menjangkau pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana

katk
dak l



Bupati Subandi di apel akbar HUT ke 48 Perumda Delta Tirta.

Kebocoran Air Masih 38 Persen

Subandi Dorong
Delta Tirta
Tingkatkan Layanan

Sidoarjo - HARIAN BANGSA
Bupati Sidoarjo Subandi mendorong Perumda Delta Tirta Sidoarjo terus meningkatkan

Perumda Delta Tirta. Menurut-nya, momentum ini harus menjadi titik evaluasi sekaligus penguatan komitmen untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. "Tingkat kebocoran air masih cukup tinggi, ada sekitar 38%. Ini masih menjadi PR

Subandi mengatakan bahwa pelayanan air bersih bukan sekadar urusan bisnis perusahaan daerah, tetapi juga merupakan pelayanan dasar kepada masyarakat. "Layanan yang saudara berikan bukan sekadar urusan bisnis perusahaan daerah,



TUGAS BARU: Kepala Disporapar Sidoarjo Yudhi Irianto melantik pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

Badan Promosi Pariwisata Siap Promosikan Wisata Mangrove Sedati sebagai Ikon Baru

KOTA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mulai memperkuat pengembangan sektor pariwisata dengan membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo masa bakti 2026-2029.

Lembaga tersebut diharapkan menjadi ujung tombak promosi berbagai destinasi wisata unggulan, termasuk kawasan mangrove di pesisir timur Kecamatan Sedati yang diproyeksikan sebagai ikon wisata baru Sidoarjo.

Pelantikan pengurus BPPD digelar di Pendapa Delta Wibawa Sidoarjo, Selasa (7/7). Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Sidoarjo,

● Ke Halaman 10

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan
Sekretariat DPRD Sidoarjo



Bupati Subandi di apel akbar HUT ke 48 Perumda Delta Tirta.

Kebocoran Air Masih 38 Persen

Subandi Dorong Delta Tirta Tingkatkan Layanan

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Bupati Sidoarjo Subandi mendorong Perumda Delta Tirta Sidoarjo terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Ada beberapa hal yang disoroti, di antaranya cakupan layanan yang baru mencapai sekitar 35% dan tingkat kebocoran air yang masih 38%.

Itu disampaikan Subandi saat memimpin Apel Akbar HUT ke-48 Perumda Delta Tirta Sidoarjo di halaman kantor

Perumda Delta Tirta. Menurut-nya, momentum ini harus menjadi titik evaluasi sekaligus penguatan komitmen untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

“Tingkat kebocoran air masih cukup tinggi, ada sekitar 38%. Ini masih menjadi PR yang harus segera dibenahi,” ujar Subandi, Selasa (7/7/2026).

Selain persoalan kebocoran air, Subandi juga menyoroti cakupan layanan Perumda Delta Tirta yang saat ini baru mencapai sekitar 35%. Ia berharap perusahaan daerah tersebut terus berbenah untuk masyarakat Sidoarjo.

Subandi mengatakan bahwa pelayanan air bersih bukan sekadar urusan bisnis perusahaan daerah, tetapi juga merupakan pelayanan dasar kepada masyarakat. “Layanan yang saudara berikan bukan sekadar urusan bisnis perusahaan daerah, tetapi juga pelayanan terhadap masyarakat,” katanya.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Subandi pun meminta seluruh jajaran manajemen dan pegawai Perumda Delta Tirta menyatukan langkah. Ia menegaskan ada 3 hal yang harus menjadi pedoman dalam bekerja. (md/rus)

Bupati Sidoarjo Soroti Cakupan Pelanggan PDAM Sidoarjo Sangat Rendah

Sidoarjo, Bhirawa

Dalam HUT nya ke-48 du tahun 2026 ini, PDAM Sidoarjo mendapat sorotan keras dari Bupati Sidoarjo Subandi, karena saat ini cakupan pelanggan BUMD Sidoarjo masih sangat rendah.

Dalam apel akbar HUT PDAM Sidoarjo, Senin (6/7) kemarin, Subandi menegaskan, persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Perumda Delta Tirta. Dirinya mengatakan cakupan layanan pelanggan PDAM, saat ini baru mencapai sekitar 35 persen saja.

"Ini menunjukkan masih banyak masyarakat di Sidoarjo yang belum menikmati layanan air bersih dari perusahaan daerah ini," tegasnya dalam apel HUT PDAM Sidoarjo itu.

Maka diperintahkan harus ada langkah strategis untuk memperluas jaringan layanan agar manfaat Perumda Delta Tirta dapat dirasakan lebih luas oleh warga Sidoarjo. Warga Desa Pagerwojo dan



alikus/bhirawa.

Bupati Subandi ketika memberi peringatan kepada PDAM Sidoarjo, saat apel upacara peringatan HUT PDAM Sidoarjo ke-48.

warga Desa Entalsewu Kecamatan Buduran, membenarkan evaluasi Bupati Subandi ini.

Hariyono, seorang mantan PNS Sidoarjo, warga Desa Pagerwojo

mengatakan dirinya mulai masuk menjadi PNS Sidoarjo awal tahun 90 an, hingga pensiun sebagai PNS tahun 2024 lalu, di desanya belum tersentuh jaringan air bersih PDAM Sidoarjo.

"Kami menagih janji, pada pertengahan 2024 lalu, infonya ada pemasangan jaringan air bersih, sampai sekarang tidak ada apa-apa, berita itu hanya memberi harapan palsu alias bohong," komentarnya.

Warga di lingkungan RT nya sempat diminta mengumpulkan foto copy KTP. Sampai sekarang tidak ada tanda tanda akan ada pemasangan jaringan air bersih.

Menurut mantan PNS Sidoarjo ini, kondisi di desa Pagerwojo ini sangat ironis dengan sejumlah kompleks perumahan yang ada di Desa Pagerwojo. Di kompleks perumahan itu malah dengan gampang terailiri jaringan air bersih.

Padahal jarak antara Desa Pagerwojo dengan pusat PDAM Sido-

arjo, kata Hariyono, tidak sampai 1 kilometer. Tetapi kenapa sampai bertahun-tahun tidak ada perluasan jaringan air bersih PDAM

"Apa warga desa dianggap tidak mampu membayar bulanan PDAM?," katanya.

Hariyono membenarkan dan mendukung Bupati Subandi yang dengan tegas dan terus terang mengevaluasi kinerja para pimpinan PDAM Sidoarjo selama ini.

Keluh kesah juga diutarakan oleh warga Desa Entalsewu Kecamatan Buduran. Desa yang bersebelahan dengan Desa Pagerwojo. Warga desa yang kebetulan berprofesi sebagai PNS juga mengkritik kinerja dari PDAM Sidoarjo selama ini.

"Ini peluang, kesempatan, banyak warga desa yang pingin mendapat layanan jaringan air bersih, kok malah tidak dihiraukan sama sekali," komentar seorang PNS Sidoarjo, yang masih aktif sampai saat ini. [kus.fen]



BRANDING PRODUK: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana saat meninjau stan UMKM milik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sidoarjo, Selasa (7/7).

Wabup Dorong UMKM Kuasai Pemasaran Digital

■ Agar Tembus Pasar Nasional dan Internasional

Kemampuan menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi, khususnya dalam strategi pemasaran digital, menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Diky Putra Sanefri, Wartawan Radar Sidoarjo

KOTA-Transformasi digital kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dipenuhi agar produk lokal mampu menjangkau pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana saat meninjau stan UMKM milik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sidoarjo, Selasa (7/7).

"Transformasi digital harus dimanfaatkan sebagai peluang. Dengan menguasai pemasaran digital, pelaku UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, membangun citra produk, serta mening-

katkan nilai jual sehingga mampu bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga nasional bahkan internasional," ujar Mimik.

Dalam kunjungan tersebut, Mimik meninjau berbagai produk UMKM yang dipajang di etalase kantor Disperindag dan Dinkop UM. Beragam produk ditampilkan, mulai dari tas, aksesoris, dompet, topi, blankon, hingga aneka makanan dan minuman olahan.

Ia meminta Disperindag dan Dinkop UM lebih aktif mempromosikan produk-produk UMKM agar mampu menembus pasar yang lebih luas, mulai dari pasar lokal, luar daerah, hingga mancanegara.



Ke Halaman 10



Wabup Dorong UMKM...

Menurutnya, promosi dan pemasaran merupakan kunci agar produk UMKM Sidoarjo semakin dikenal masyarakat dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Selain meningkatkan kualitas produk, pelaku UMKM juga didorong memperkuat aspek branding, legalitas usaha, serta pemasaran berbasis digital.

Mimik juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan lembaga profesi

dalam membangun ekosistem UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia mengajak para pelaku UMKM memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disediakan pemerintah daerah, termasuk Klinik UMKM di Dinkop Sidoarjo.

"Pelaku UMKM juga harus mengikuti berbagai pelatihan. Masyarakat jangan ragu datang ke Klinik UMKM Dinkop jika masih mengalami kesulitan mengurus perizinan atau membutuhkan pendampingan.

Di sana tersedia pelatihan secara

gratis, mulai dari legalitas usaha hingga pemasaran digital. Mari bersama-sama memajukan UMKM Sidoarjo, meningkatkan omzet usaha, sekaligus mewujudkan kemandirian ekonomi daerah," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinkop Sidoarjo, Amat Adi Subhan, mengatakan pihaknya terus melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM, mulai dari pengurusan legalitas usaha hingga penguatan pemasaran.

Saat ini, kata Amat, terdapat sekitar

153 ribu pelaku UMKM yang telah terdaftar di Dinkop Sidoarjo. Seluruhnya terus didorong agar memiliki legalitas usaha sehingga lebih mudah mengakses pasar yang lebih luas.

"Yang jelas UMKM harus memiliki legalitas usaha agar bisa mengakses pasar yang lebih luas. Selain itu, kami juga terus mengarahkan pelaku UMKM memanfaatkan platform digital untuk pemasaran online," ujarnya.

Amat menambahkan, Dinkop secara rutin menggelar pelatihan pemasaran digital bagi pelaku UMKM. Dalam

pelaksanaannya, Dinkop berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk platform digital dan perusahaan swasta, untuk memberikan pelatihan promosi melalui media sosial maupun marketplace.

Melalui berbagai program pembinaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap UMKM semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, mampu meningkatkan daya saing produk, serta menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. (dik/vga)





Wakil Ketua 1 Bidang Keorganisasian PWRI Sidoarjo, Effendy, menyerahkan bantuan mashaf Al-Quran kepada ketua TAKMIR masjid Al Muthoharoh Desa Rangkah Kidul.

HUT PWRI ke-64

PWRI Serahkan Bantuan Mashaf Al-Qur'an

Sidoarjo, Bhirawa

PWRI Kabupaten Sidoarjo Menyerahkan bantuan Mushaf Al Qur'an kepada sejumlah masjid di Kabupaten Sidoarjo, pada peringatan HUT PWRI ke-64 tahun 2026 ini. Di antaranya ke Masjid Al Muthoharoh di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo dan Masjid Al Hidayah Desa Gedangan Kecamatan Gedangan.

Agustin Iriyani, Bidang kerohanian PWRI Kabupaten Sidoarjo, Selasa (7/7) kemarin, mengatakan semoga bantuan tersebut bermanfaat untuk memperbanyak koleksi bacaan literatur yang ada di dalam masjid. "Semoga koleksi bacaan di dalam masjid tambah banyak, dan

bisa menambah amal ibadah para jamaah masjid maupun masyarakat umum yang membacanya," komentar mantan Camat Sidoarjo Kota tersebut, ketika menyerahkan bantuan itu di dua masjid besar tersebut.

Dirinya mengatakan hampir setiap tahun dalam peringatan HUT PWRI, PWRI Sidoarjo menyerahkan bantuan Mushaf Al-Quran kepada sejumlah masjid.

Wakil Ketua 1 Bidang Keorganisasian PWRI Kabupaten Sidoarjo, Effendy, dalam kesempatan tersebut juga menambah banyak kegiatan yang dilakukan oleh para Wredatama Sidoarjo untuk memperingati HUT PWRI.

Pada tahun 2026 ini diantaranya anggota PWRI Sidoarjo juga akan melakukan kerja Bhakti bersama-sama di area alun-alun Sidoarjo pada Jumat, 10 Juli, lusa. Diharapkan, para Wredatama Sidoarjo juga punya andil dalam ikut menjaga kebersihan lingkungan kota Sidoarjo.

"Karena alun-alun kota Sidoarjo saat ini di desain juga ramah kepada orang tua, para Wredatama bisa menikmati sarana yang ada disana. Sehingga kita juga perlu ikut merawat dan menjaganya," komentar mantan Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Sidoarjo itu.

Menurut Effendy, kelembagaan

PWRI ini telah terbentuk pada semua kecamatan di kabupaten Sidoarjo atau di 18 kecamatan. Diakui memang ada kepengurusan kecamatan yang aktif dan ada yang kurang aktif. Program PWRI Sidoarjo yang mungkin beda dengan program PWRI di daerah lain, menurut Effendy, diantaranya dengan menjadi keanggotaan PWRI Sidoarjo, para Wredatama ini bisa mendapat keringanan dari Pemkab Sidoarjo dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) setiap tahun. Sebesar Rp75 ribu perorang. "Bagi para pensiunan, ya cukup lumayan," komentarnya.[kus.ca]



TUGAS BARU: Kepala Disporapar Sidoarjo Yudhi Irianto melantik pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

Badan Promosi Pariwisata Siap Promosikan Wisata Mangrove Sedati sebagai Ikon Baru

KOTA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mulai memperkuat pengembangan sektor pariwisata dengan membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo masa bakti 2026–2029.

Lembaga tersebut diharapkan menjadi ujung tombak promosi berbagai destinasi wisata unggulan, termasuk kawasan mangrove di pesisir timur Kecamatan Sedati yang diproyeksikan sebagai ikon wisata baru Sidoarjo.

Pelantikan pengurus BPPD digelar di Pendapa Delta Wibawa Sidoarjo, Selasa (7/7). Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Sidoarjo,

● Ke Halaman 10



Badan Promosi...

Yudhi Irianto, mengatakan pembentukan BPPD merupakan amanat regulasi sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat branding dan promosi pariwisata daerah.

"Keberadaan Badan Promosi Pariwisata Daerah memang secara legalitas harus dibentuk di setiap kabupaten dan kota. Harapan kami, mitra ini bisa menjadi ujung tombak pemerintah dalam meningkatkan promosi pariwisata. Promosi tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.

Menurut Yudhi, Pemkab Sidoarjo saat ini tengah mengembangkan ber-

bagai potensi wisata, mulai dari wisata pesisir, wisata edukasi, wisata industri, wisata religi, museum, hingga wisata bahari. Seluruh program tersebut disusun secara terpadu bersama organisasi perangkat daerah (OPD) agar pengembangannya lebih terarah.

Salah satu destinasi yang menjadi fokus pengembangan adalah kawasan Curah Asmoro di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati. Kawasan ini menawarkan wisata susur sungai di tengah hutan mangrove yang masih alami dengan panorama khas pesisir.

Tak hanya itu, kawasan tersebut juga menjadi habitat berbagai biota laut yang menjadi daya tarik tersen-

diri, seperti ubur-ubur dan hiu tutul yang kerap muncul pada periode Januari hingga Juni.

"Potensi paling unik yang kita miliki adalah wisata susur sungai di kawasan mangrove. Di sana ada ubur-ubur dan hiu tutul yang muncul pada Januari hingga Juni. Ini yang harus mampu dibranding oleh teman-teman BPPD agar menjadi daya tarik wisata Sidoarjo," jelasnya.

Yudhi menilai Curah Asmoro memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan. Selain menyalurkan keindahan alam, kawasan tersebut diyakini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir

melalui sektor pariwisata.

Karena itu, ia berharap BPPD mampu menghadirkan strategi promosi yang lebih kreatif dan inovatif agar potensi wisata Sidoarjo semakin dikenal masyarakat luas.

"Salah satu upaya adalah membangun kolaborasi dan sinergi program. Jadi antara pemerintah dengan BPPD saling terhubung sehingga kebutuhan pengembangan pariwisata yang mendesak di Sidoarjo bisa dijalankan bersama," katanya.

Yudhi mengakui Sidoarjo memang tidak memiliki bentang alam pegunungan seperti sejumlah daerah lain di Jawa Timur. Namun, ia optimistis

potensi wisata yang dimiliki dapat bersaing apabila dikemas dengan branding yang kuat dan promosi yang berkelanjutan.

"Harapannya Sidoarjo menjadi daerah tujuan wisata yang mampu bersaing, bukan lagi hanya dikenal sebagai daerah penyangga Kota Surabaya," tegasnya.

Melalui pembentukan BPPD, Pemkab Sidoarjo optimistis promosi destinasi wisata akan semakin terarah, memperkuat identitas pariwisata daerah, sekaligus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. (dik/vga)



Mantan Ketua DPRD Purworejo Terpilih Jadi Dirut Delta Tirta

SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo mengumumkan tiga direksi terpilih Perumda Delta Tirta hasil seleksi tahun 2026. Ketiga nama tersebut diumumkan setelah seluruh tahapan tes rampung, termasuk wawancara akhir.

Mantan Ketua DPRD Purworejo Luhur Pambudi Mulyono terpilih sebagai calon Direktur Utama (Dirut) Perumda Delta Tirta. Sementara Widyo Nugroho terpilih sebagai calon direktur operasional dan Rivelino Rizky Muchtar sebagai calon direktur pelayanan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Fenny Apridawati mengatakan, hasil seleksi tersebut akan diajukan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperoleh pertimbangan. Setelah proses itu selesai, Pemkab baru dapat menetapkan direksi definitif. "Kami mengajukan permohonan pertimbangan kepada Kemendagri sebelum dilakukan pelantikan," katanya kemarin (7/7).

Fenny menjelaskan, salah satu pekerjaan yang menanti direksi baru adalah melaku-



DOK GESTURI

Luhur Pambudi Mulyono

kukan asesmen pegawai. Hal tersebut untuk memetakan kebutuhan sumber daya manusia karena saat ini jumlah pegawai dinilai melebihi kebutuhan di beberapa bagian. "Nanti asesmen itu menjadi salah satu tugas direksi baru," ujarnya.

Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Delta Tirta Heri Suhartono menyebut jika terdapat kelebihan pegawai di perusahaan daerah air minum (PDAM). Kondisi itulah yang membuat Pemkab mendorong direksi baru untuk melakukan asesmen. "Ada kelebihan sekitar 15 pegawai," ungkapnya. (ful/hen)

Jawa Pos

Luhur Terpilih Jadi Direktur Utama Delta Tirta

■ Bupati: Tak Ada Titipan

KOTA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo resmi mengumumkan tiga nama calon anggota direksi terpilih Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Delta Tirta Sidoarjo yang akan memimpin perusahaan daerah penyedia layanan air minum tersebut.

Pengumuman itu tertuang dalam Pengumuman Bupati Sidoarjo Nomor 900.1.13.2/0257/ 438.1.2.1/2026 tentang Calon Anggota Direksi Terpilih Hasil Wawancara Akhir Seleksi Calon Anggota Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo Tahun 2026.

Tiga nama yang dinyatakan lolos yakni Luhur Pambudi

Mulyono, S.T., M.M. sebagai calon Direktur Utama, Dr. Widyo Nugroho, S.T., M.M.T. sebagai calon Direktur Operasional, serta Rivelino Rizky Muchtar, S.Pi., M.M. sebagai calon Direktur Pelayanan.

Sesuai mekanisme yang berlaku, ketiga calon direksi tersebut selanjutnya akan diajukan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh pertimbangan sebelum ditetapkan secara definitif.

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan seluruh proses seleksi dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi dan hasil asesmen. Ia membantah

● Ke Halaman 10



Luhur Terpilih...

adanya praktik titipan maupun intervensi pihak tertentu dalam

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Riset dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

"Kita kepingin profesional. Namanya benah-benah. Kalau nanti ada suatu titipan, kalau ada permasalahan

han jadinya ewuh pekewuh. Saya enggak mau seperti itu," tegas Subandi. Selasa (7/7).

Menurutnya, Perumda Delta Tirta mampu bekerja secara profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat. Karena

itu, setiap tahapan seleksi difokuskan pada kemampuan, integritas, dan kapasitas masing-masing peserta.

Subandi juga menegaskan bahwa dengan mengedepankan indikator kinerja yang jelas. Tidak akan ada perlakuan istimewa bagi siapa pun apabila

tidak mampu mencapai target maupun meningkatkan kualitas pelayanan.

"Kalau dia tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai Direktur DAM, pelayanan tidak profesional, ya sudah kita berhentikan sesuai dengan kinerjanya," ujarnya.

Ia berharap direksi yang nantinya

ditetapkan dapat membawa Perumda Delta Tirta menjadi perusahaan daerah yang semakin sehat, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik, sehingga mampu memberikan layanan air bersih yang semakin baik kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo. (dik/vga)

Subandi Minta Program PKK Selaras Asta Cita

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Bupati Sidoarjo Subandi menyebut peran kader PKK sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, Pemkab Sidoarjo akan terus mendukung berbagai program Tim Penggerak (TP) PKK.

Hal tersebut disampaikan Subandi dalam peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Hall Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sidoarjo.

Subandi menyebut program-program PKK harus selaras dengan kebijakan Asta Cita maupun pemerintah pusat, terutama pada bidang pangan, sandang, dan tata laksana rumah tangga guna mewujudkan keluarga sejahtera.

“Kader PKK merupakan garda terdepan dalam mewujudkan pemenuhan gizi seimbang dan ketahanan pangan keluarga sebagai bekal menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus mendukung gerakan PKK,” ujar Subandi, Selasa (7/7/2026).

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader PKK mulai tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa yang selama ini menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

“Program pemerintah tidak bisa diselesaikan oleh bupati sendiri. Keberhasilan pembangunan membutuhkan kebersamaan seluruh elemen masyarakat, termasuk kader PKK yang setiap bulan aktif menjalankan berbagai kegiatan di tengah masyarakat. Program PKK harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tuturnya. (md/rus)



Bupati dan Ketua TP PKK Sidoarjo dalam HKG PKK.

Cakades Pagerwojo Gugat SK Pelantikan Kepala Desa

Setelah Gugatan Pertama ke PTUN Ditolak

SIDOARJO – Sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pagerwojo belum berakhir meski sudah ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Calon kepala desa (cakades) nomor urut 2 Muhammad Zainul Abidin bersiap mengajukan gugatan baru ke pengadilan. Kali ini, gugatan diarahkan terhadap Surat Keputusan (SK) Bupati Sidoarjo terkait pengesahan dan pelantikan Kades Pagerwojo terpilih.

Gugatan pertama sengketa Pilkades Pagerwojo sempat tidak diterima PTUN. Gugatan itu dinyatakan *dismissal* atau belum dapat diperiksa karena dinilai diajukan terlalu dini. Zainul menyebut, gugatan kedua diajukan karena



MASIH BEPERKARA: Cakades Pagerwojo Muhammad Zainul Abidin mengajukan gugatan untuk kedua kalinya usai gugatan pertama ditolak.

waktunya sudah tepat. "Sebenarnya, gugatan pertama merupakan bentuk pemberitahuan ke bupati kalau masih ada sengketa. Namun, pelantikan tetap dilanjutkan," kata Zainul. Dia mengatakan, saat ini, tim kuasa hukum tengah menyiapkan gugatan kedua ke PTUN. Selain bupati, Zainul juga memasukkan Ketua BPD Pagerwojo sebagai tergugat. "Yang ber-

sangkutan kami gugat karena bertanggung jawab atas penyelenggaraan pilkades," imbuhnya.

Dua Sengketa Lain Pemeriksaan Berkas

Zainul menyoroti adanya 1.482 surat suara yang dicatat rusak. Seharusnya, surat suara itu disahkan. Berdasarkan keterangan saksi, surat suara yang dinyatakan tidak sah merupakan surat



Yang bersangkutan kami gugat karena bertanggung jawab atas penyelenggaraan pilkades."

Muhammad Zainul Abidin
Cakades Pagerwojo

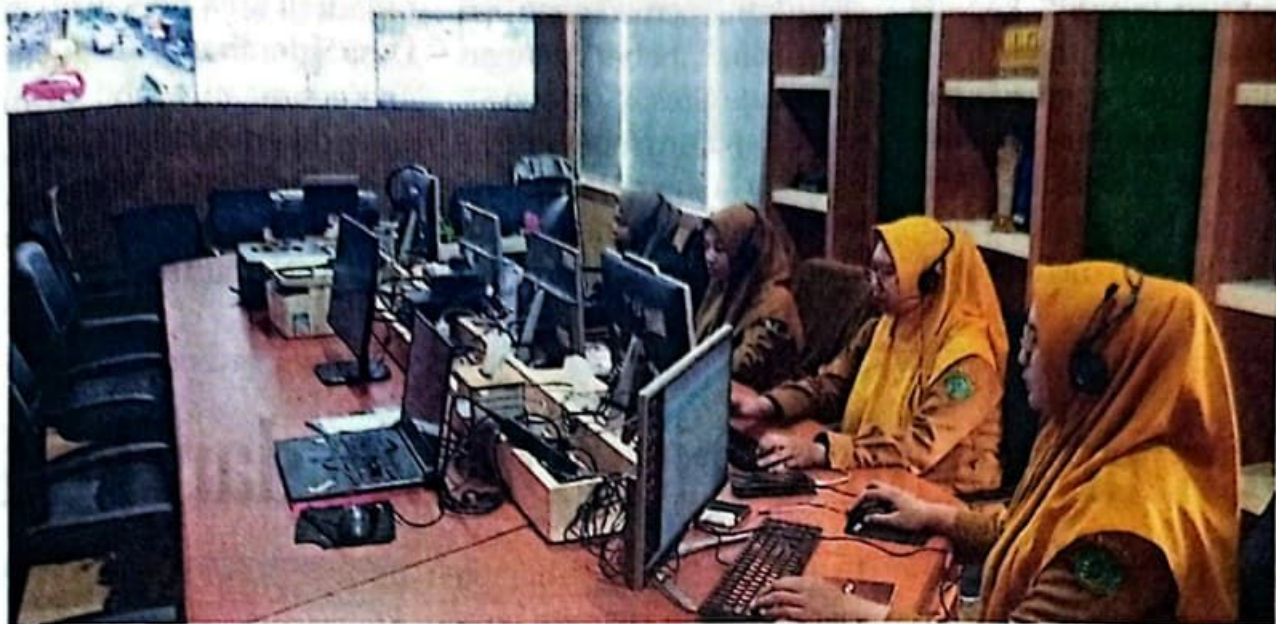
suara simetris. Padahal, menurut Zainul, surat suara tersebut seharusnya tetap dihitung sebagai suara sah.

"Dalam surat edaran sekda pada poin enam disebutkan surat suara seperti itu (simetris, Red) dianggap sah," ujarnya kemarin (7/7). Zainul menjelaskan, dari total 21 tempat pemungutan suara (TPS), sebanyak 18 TPS

tidak mengesahkan surat suara simetris. Sementara tiga TPS lainnya tetap menghitung surat suara tersebut sebagai suara sah. Perbedaan perlakuan itu memengaruhi hasil akhir perolehan suara sehingga sengketa diputuskan berlanjut melalui jalur hukum.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo Hernita Hadi Lestari menyebut, masih ada dua sengketa pilkades lain yang juga sedang berproses di PTUN. Sengketa Pilkades Sidokepong telah memasuki tahap pemeriksaan berkas. Sedangkan, perkara Pilkades Balongdowo masih dalam tahap pemeriksaan kelengkapan administrasi. "Sidokepong sidangnya hari Rabu dan Balongdowo hari Kamis," pungkasnya. (ful/hen)

Jawa Pos



DINAS KOMINFO SIDOARJO

SERING KENA PRANK: Petugas Call Center 112 melayani pengaduan masuk di Dinas Kominfo Sidoarjo. Ada 21.478 panggilan yang diterima selama Januari-Juni 2026.

Enam Bulan, Call Center 112 Terima 15.339 Panggilan Iseng

SIDOARJO – Angka pengaduan yang masuk ke Call Center (CC) 112 cukup tinggi. Meski begitu, jumlah panggilan iseng yang diterima petugas juga tak sedikit. Dinas Kominfo Sidoarjo mendorong masyarakat memanfaatkan layanan secara bijak.

Dalam satu semester awal 2026, tercatat ada 21.478 panggilan masuk ke CC 112. Sebanyak 15.339 panggilan di antaranya merupakan ghost call. Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo Eri Sadewo menyebut, panggilan iseng mendominasi setiap bulan. Ada yang menelepon tetapi tidak ada suara atau hanya suara angin saja.

Jumlah tertinggi ghost call



Ada **21.478** panggilan masuk



15.339 merupakan panggilan iseng



Ada **783** laporan PJU mati



Laporan terbanyak di bulan Maret

Sumber: Dinas Kominfo Sidoarjo

GRAFIS: ADITYA JAWA POS

terjadi pada Maret. "Pada bulan Maret mencapai 3.386 panggilan iseng atau sekitar 78,6 persen dari total panggilan yang dijawab," katanya kemarin (7/7). Tren ghost call turun di bulan April tetapi kemudian naik sedikit di bulan Mei dan Juni.

Eri berharap masyarakat menggunakan layanan no-

mor darurat secara bijak agar tidak menghambat penanganan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan. "Kami berharap masyarakat bisa saling mengedukasi agar panggilan prank ini bisa ditekan, sehingga layanan kedaruratan bisa berjalan lebih maksimal," ujarnya. (eza/hen)

Jawa Pos



DISPORAPAR



RE: SAIFUL, ROHMANU, JANA POS

GALI POTENSI WISATA: Kepala Disporapar Sidoarjo Yudhi Irianto melantik anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah kemarin (7/7).

Bentuk Badan Promosi untuk Angkat 24 Destinasi Wisata

SIDOARJO – Tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Delta masih kurang. Untuk menggenjot tingkat kunjungan, Pemkab Sidoarjo membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD). Mereka ditugaskan untuk mengangkat potensi 24 destinasi wisata yang tersebar di berbagai wilayah.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Disporapar) Sidoarjo Yudhi Irianto mengatakan, pembentukan BPPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang harus dijalankan. Promosi pariwisata tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan perlu dukungan berbagai pihak. "Kami ingin BPPD jadi ujung tombak dalam meningkatkan promosi pariwisata," katanya.

Saat ini Sidoarjo memiliki beragam destinasi wisata, mulai wisata alam, sejarah, religi, edukasi, hingga wisata buatan. Salah satu potensi yang menjadi perhatian adalah kawasan mangrove di pesisir timur Sedati. Kawasan itu menawarkan wisata susur sungai dengan pemandangan hutan mangrove yang masih alami.

Yudhi berharap penguatan branding mampu mengubah citra Sidoarjo sebagai daerah tujuan wisata. Baginya, potensi yang dimiliki tidak kalah dengan daerah lain jika dipromosikan secara konsisten. "Kami ingin wisata Sidoarjo memiliki daya saing dengan daerah lain di Jatim," kata Yudhi. (ful/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



HIBURAN:
Pengunjung
Wisata
Punden Mbah
Retjo menaiki
wahana
kereta yang
mengelilingi
tempat
rekreasi.

Libur Sekolah, Punden Mbah Retjo Dikunjungi 100 Orang Per Hari

SIDOARJO – Momen libur sekolah mendorong jumlah kunjungan ke Wisata Punden Mbah Retjo di Desa Ganggangpanjang, Tanggulangin hingga dua kali lipat. Lonjakan paling terasa saat akhir pekan. Jumlah pengunjung bahkan mencapai lebih dari 100 orang per hari.

Sekretaris Desa Ganggangpanjang Anang Wahyu Ardianto mengatakan, kunjungan pada hari kerja rata-rata 20 orang per hari. Jumlah

pengunjung naik menjadi 40 orang per hari saat libur. Kenaikan juga terjadi pada akhir pekan. Tingkat kunjungan naik dua kali lipat dari rata-rata 50 orang menjadi 100 orang per hari.

"Wisatawan datang bersama keluarga. Paling favorit naik kereta keliling sawah dan sungai," katanya kemarin (7/7). Meningkatnya jumlah wisatawan juga membawa dampak ekonomi bagi warga sekitar. Sejumlah titik kosong di ka-

wasan Punden Mbah Retjo dimanfaatkan masyarakat untuk membuka lapak.

Anang menambahkan, pengelola punden yang berdiri sejak 2023 ini juga menyiapkan layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat pada akhir pekan yang bertepatan dengan hari terakhir libur sekolah. "Akhir pekan ini kami kerjasama dengan perusahaan bikin cek kesehatan gratis juga untuk keluarga yang berkunjung," ujarnya. (eza/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Peringatan HKG PKK Ke-54

Kader PKK Sidoarjo Diperkuat untuk Dukung Indonesia Emas 2045

Sidoarjo, Memorandum
Gerakan PKK dinilai menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam membangun kualitas keluarga Indonesia. Karena itu, Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Sidoarjo, Sriatun Subandi, mengajak seluruh kader PKK memperkuat pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sebagai pondasi pemberdayaan keluarga ekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Ajakan tersebut disampaikan saat peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 yang digelar di Hall Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sidoarjo, Senin (6/7). Peringatan ahun ini mengusung tema "Kutakan 10 Program Pokok PKK, aksanakan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045."
Menurut Sriatun, tema tersebut menjadi pengingat bahwa PKK merupakan pondasi utama

pemberdayaan keluarga sekaligus mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"PKK harus terus meneguhkan jati dirinya sebagai pondasi utama pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. PKK hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan melalui penguatan keluarga," ujarnya.
Ia meminta seluruh kader terus meningkatkan kapasitas sebagai agen perubahan di tengah masyarakat sekaligus berperan aktif menyelesaikan program Asta Cita Presiden.
Sriatun menyebut kekuatan organisasi PKK sangat besar. Secara nasional terdapat sekitar 91.600 kepengurusan TP PKK di tingkat desa dan kelurahan, didukung 2.079.639 kelompok PKK di tingkat dusun, RW, dan RT, dengan lebih dari 6,3 juta ka-

der yang bekerja secara sukarela menjangkau keluarga hingga tingkat paling bawah.
"Melalui jaringan yang begitu luas, PKK memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045," katanya.
Ia menambahkan, momentum HKG PKK ke-54 juga harus menjadi sarana memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh kader agar program pemberdayaan keluarga berjalan lebih terpadu dan berkelanjutan.
Selain itu, TP PKK berencana menjalin kerja sama dengan organisasi advokat Indonesia untuk memperluas akses pendampingan hukum bagi masyarakat, khususnya di lingkungan keluarga dan komunitas.

"Saya berharap peringatan HKG PKK dapat dilaksanakan secara sederhana dan khidmat, namun mampu memperkuat komitmen untuk terus hadir dan bekerja di tengah masyarakat. Kebersamaan ini harus diwujudkan melalui kerja nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat," tuturnya.
Sriatun juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader PKK di Indonesia yang selama ini mengabdikan waktu dan tenaga tanpa pamrih, mulai dari tingkat pusat hingga kelompok dasawisma.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus mendukung seluruh program TP PKK karena dinilai memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, program PKK



PKK Sidoarjo diajak memperkuat 10 Program Pokok PKK sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

harus berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam penguatan ketahanan pangan keluarga, pemenuhan gizi seimbang, serta tata laksana rumah tangga.
"Kader PKK merupakan garda terdepan dalam mewujudkan pemenuhan gizi seimbang dan ketahanan pangan keluarga sebagai bekal menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo akan terus mendukung gerakan PKK," kata Subandi.
Ia juga mengapresiasi seluruh kader PKK dari tingkat kabupaten hingga desa yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan berbagai program pembangunan.
"Program pemerintah tidak bisa diselesaikan oleh

bupati sendiri. Keberhasilan pembangunan membutuhkan kebersamaan seluruh elemen masyarakat, termasuk kader PKK yang setiap bulan aktif menjalankan berbagai kegiatan di tengah masyarakat. Program PKK harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat," tambahnya.
Peringatan HKG PKK ke-54 di Kabupaten Sidoarjo turut diakhiri dengan penyerahan Penghargaan Adhi Bhakti Pratama bagi kader PKK yang telah mengabdikan selama 30 hingga 35 tahun.
Selain itu digelar lomba Gerakan Tanam (Gertan) Cabai antarkecamatan, lomba paduan suara, fashion show pengurus TP PKK, penampilan line dance Kena TP PKK kecamatan, musik rebana, hingga fashion show dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Dharma Wanita. (kri/jok/ter)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

BPD dan Warga Bakungpringgodani Lapor ke Polresta Sidoarjo

Akses Sawah Ditutup Pagar

Sidoarjo, Memorandum

Konflik dugaan penutupan jalan usaha tani di Desa Bakungpringgodani, Kecamatan Balongbendo, memanans. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama sejumlah warga akhirnya membawa persoalan itu ke Polresta Sidoarjo, Selasa (7/7), setelah akses menuju area persawahan disebut dipagar dan tak lagi bisa dilintasi.

Jalan yang dipersiapkan selama ini diklaim sebagai jalan desa yang menjadi urat nadi aktivitas para petani. Namun, sejak berdirinya pembangunan kawasan milik PT Bumi Pringgodani Permai (PT BPP), akses tersebut disebut tertutup pagar sehingga petani kesulitan menuju lahan garapan mereka.

Ketua BPD Desa Bakungpringgodani, Sunowo Hadi Pur-

nomo, mengatakan laporan ke polisi dilakukan agar ada kepastian hukum sekaligus memperjuangkan agar akses jalan petani kembali dibuka.

"Kami melaporkan karena akses jalan desa atau jalan petani ditutup dengan pagar. Masyarakat meminta agar jalan itu dikembalikan karena merupakan akses petani menuju sawah," ujar Sunowo usai membuat laporan.



Ketua BPD Desa Bakungpringgodani usai melaporkan dugaan penutupan jalan petani ke Polresta Sidoarjo.

Ia menjelaskan, sejak kawasan tersebut mulai dikembangkan, warga tidak lagi dapat

melintasi jalan yang selama bertahun-tahun digunakan menuju areal persawahan.

"Tidak bisa dilewati karena tertutup pagar. Padahal itu masih menjadi akses petani. Sejak ada pembangunan, jalan tersebut ditutup sehingga petani kehilangan akses menuju sawah," katanya.

Di sisi lain, pihak PT BPP menyatakan belum dapat memastikan status hukum jalan yang dipersiapkan warga. Koordinator Lapangan Sekuriti Wilayah Sidoarjo PT BPP, Rudi, mengatakan perusahaan memperoleh lahan melalui mekanisme jual beli sehingga perlu dilakukan pemeriksaan mengenai status jalan tersebut.

"Saya juga tidak begitu paham soal jalan itu. Bos saya membeli tanah. Kalau memang benar ada jalan yang ikut dijual,

tentu perlu dilihat lagi prosesnya. Ini masih simpang siur. apakah jalan itu masuk tanah gogol atau memang ada jalan tersendiri," ujarnya saat dihubungi melalui telepon.

Rudi menegaskan perusahaan tidak ingin polemik tersebut berkepanjangan. Menurutnya, PT BPP siap membuka seluruh dokumen dan berdialog dengan pemerintah desa maupun masyarakat agar persoalan dapat diselesaikan secara objektif.

"Kalau mau rumbukan ayo, kita buka semua datanya. Kalau memang ada kesalahan pengukuran atau kekeliruan, mari kita luruskan bersama. Tidak boleh ada yang bertindak se-

mena-mena, apalagi menyangkut kepentingan masyarakat," tegasnya.

Hingga kini, status jalan yang dipersiapkan masih menjadi perdebatan. Warga meyakini lokasi tersebut merupakan jalan usaha tani milik desa yang selama ini digunakan masyarakat. Sementara itu, terdapat pandangan lain yang menyebut jalan tersebut merupakan bagian dari tanah gogol yang telah diperjualbelikan kepada pihak perusahaan.

Kasus ini kini menunggu tindak lanjut dari Polresta Sidoarjo untuk mengungkap status hukum jalan tersebut dan mencari solusi agar konflik tidak semakin meluas. (jun/jok/har/fer)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Lima Tahun Nol Sampah ke TPA, TPS3R Bringinbendo Olah hingga 7 Ton Sampah per Hari

TAMAN-Di tengah semakin terbatasnya kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo Jabon, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, justru menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat mampu menjadi solusi nyata.

Melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), desa tersebut berhasil mengolah seluruh sampah warganya secara mandiri. Selama lima tahun terakhir, tidak ada satu kilogram pun sampah yang dikirim ke TPA.

Setiap hari, TPS3R Bringinbendo menerima sekitar lima hingga tujuh ton sampah rumah tangga. Meski seluruh proses pemilahan masih dilakukan secara manual, seluruh sampah berhasil diolah sehingga

tidak menambah beban TPA Griyo Mulyo Jabon.

Kepala Desa Bringinbendo, Soleh Dwi Cahyono, mengatakan volume sampah yang masuk bervariasi setiap hari. Peningkatan biasanya terjadi pada awal pekan setelah libur akhir pekan.

"Setiap hari rata-rata lima sampai tujuh ton. Hari Senin dan Selasa biasanya mencapai tujuh ton karena merupakan sampah yang menumpuk sejak hari Minggu. Sedangkan Rabu hingga Jumat berkisar lima sampai enam ton," ujarnya.

Menurut Soleh, sejak TPS3R mulai beroperasi pada 2021, seluruh proses pemilahan masih mengandalkan tenaga manusia. Sampah yang datang dalam kondisi tercampur dipilah satu per satu sebelum diproses lebih lanjut. (dik/vga)



MANDIRI: Kepala Desa Bringinbendo, Soleh Dwi Cahyono (kanan), mengecek aktivitas TPS3R Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Selasa (7/7).

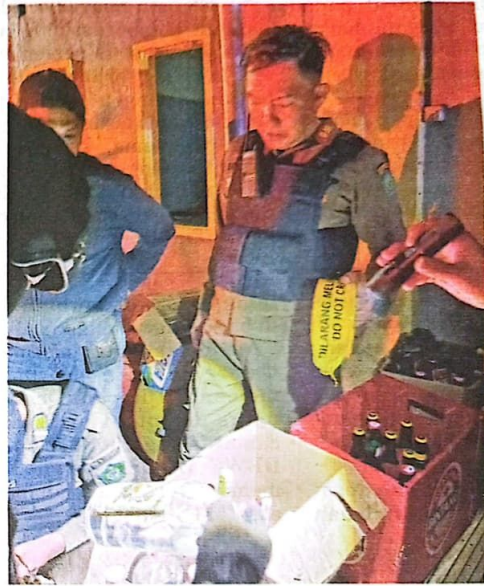
Pembongkaran Warung Remang-Remang di Eks Tol HK Jabon Dimatangkan

KOTA-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mematangkan rencana penertiban warung remang-remang dan bangunan liar di kawasan eks Tol HK Jabon. Saat ini, Satpol PP Sidoarjo masih berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait sebelum menetapkan jadwal pembongkaran.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Kabid Tibumtranmas) Satpol PP Sidoarjo, R. Novianto Koesno Adi, mengatakan pelaksanaan penertiban masih menunggu hasil rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, serta Jasa Marga. "Jadwal pelaksanaannya masih belum ditentukan. Saat ini masih dibahas dalam rapat bersama," katanya.

Novianto menjelaskan, jumlah bangunan di sepanjang kawasan eks Tol HK Jabon diperkirakan mencapai sekitar 400 unit.

● Ke Halaman 10



MELANGGAR: Satpol PP menemukan sejumlah minuman keras saat razia warung di Eks Tol HK Jabon.

radarsidoarjo.id 031-5828 0826 radarsidoarjo@gmail.com Radar Sidoarjo [radarsidoarjo](https://www.instagram.com/radarsidoarjo)



Pembongkaran Warung...

Bangunan tersebut terdiri atas warung remang-remang, tempat karaoke, hingga angkringan yang membentang dari utara Sungai Brantas Porong hingga memasuki wilayah Bangil.

Namun, saat pendataan sebelumnya, petugas hanya berhasil mendata sekitar 50 bangunan. Menurut Novi-

anto, kondisi itu terjadi karena informasi mengenai rencana penertiban lebih dulu tersebar sehingga banyak bangunan tidak sempat didata.

"Jumlah keseluruhannya diperkirakan sekitar 400 bangunan. Saat pendataan sebelumnya, petugas hanya sempat mendata sekitar 50 bangunan karena informasi penertiban sudah lebih dulu bocor," ujarnya.

Rencana pembongkaran mencuat setelah razia yang digelar pada Sabtu (4/7) malam. Dalam operasi tersebut, seorang perempuan yang mengaku sebagai pengelola Wardah Music mengaku menyewa bangunan kepada Kepala Desa Jemirahan dengan nilai Rp8 juta per tahun untuk masa sewa selama dua tahun.

Pengakuan itu memunculkan dugaan adanya praktik penyewaan lahan

milik negara di kawasan yang berada di bawah kewenangan BBWS Brantas.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Camat Jabon Abdul Rokhim telah memanggil Kepala Desa Jemirahan untuk dimintai klarifikasi. Pihak kecamatan juga berkoordinasi dengan BBWS Brantas Jawa Timur guna memastikan status lahan di kawasan eks Tol HK Jabon.

"Kepala desa sudah kami surati dan kami panggil. Kami juga berkoordinasi dengan BBWS Brantas Jawa Timur selaku pemegang kewenangan atas lahan di kawasan eks Tol HK Jabon. Kami berkomitmen tidak akan melindungi pihak mana pun apabila terbukti melakukan pungutan liar atau menyewakan aset negara secara tidak sah," tegas Abdul Rokhim. (sur/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Rehabilitasi ODGJ-Lansia Belum Ideal

► Liponsos Butuh Perhatian ► Ruang Sempit Fasilitas Minim

SIDOARJO, SURYA - Rehabilitasi sosial di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Sidoarjo masih terkendala ruang dan fasilitas. Kondisi itu membuat pelayanan bagi warga binaan, khususnya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan lanjut usia (lansia), belum dapat berlangsung secara optimal.

Saat ini terdapat sekitar 102 warga binaan di Liponsos Sidoarjo. Mereka terdiri atas lansia dan ODGJ. Keterbatasan ruang membuat para penghuni harus tinggal berdesakan tanpa pemisahan berdasarkan kondisi kesehatan maupun tingkat gangguan kejiwaan.

Hingga kini, Liponsos Sidoarjo masih menempati bangunan berstatus pinjaman. Kondisi tersebut membuat pengelola tidak leluasa menyekat atau membagi ruangan berdasarkan tingkat gangguan kejiwaan penghuni.

ni, mulai kategori berat, sedang, hingga ringan.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Diana Ambarukmi, mengakui belum adanya zonasi ruang berdampak terhadap efektivitas rehabilitasi, terutama bagi ODGJ yang mulai menunjukkan perkembangan menuju kesembuhan.

"Kenyataannya memang kami belum ada pemisahan bangunan atau ruang-ruang khusus untuk level sembuh, setengah sembuh, sampai yang sakit. Semuanya masih campur dalam satu lingkungan," ujar Diana, Selasa (7/7).

Idealnya setiap penghuni ditempatkan pada ruang yang disesuaikan dengan fase klinisnya. Percampuran pasien dengan gejala berat dan pasien yang mulai stabil berisiko memicu kemunduran kondisi psikologis (relap-

sej) bagi mereka yang hampir sembuh. "Harapannya ada ruangan sendiri-sendiri. Kalau penghuni sudah sembuh nanti bisa dijemput keluar-ga, atau jika sebatang kara, akan kami berdayakan," lanjutnya.

Persoalan tak berhenti pada keterbatasan ruang. Liponsos juga masih kekurangan fasilitas penunjang kebutuhan dasar, termasuk pakaian layak pakai.

Karena tidak tersedia anggaran untuk jasa penatu (laundry), pengelola menerapkan sistem pakaian sekali buang bagi pakaian yang sudah terkena kotoran atau limbah domestik penghuni.

Liponsos pun bergantung pada bantuan berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan kaos oblong, celana pendek, pakaian dalam pria dan wanita, kain sarung, serta matras atau alas tidur.

Di sisi lain, keterbatasan

juga terjadi pada sarana sanitasi dan alat makan. Demi alasan keamanan, penghuni menggunakan kertas minyak sebagai alas makan. Pengelola menghindari penggunaan piring maupun mangkuk karena kerap disalahgunakan penghuni dengan gangguan berat.

"Kalau pakai mangkuk, sering kali tidak digunakan untuk tempat makan, melainkan dipakai untuk buang air besar dan sebagainya," ungkapnya.

Untuk menunjang pelayanan medis dan logistik darurat, Dinas Sosial terus berkoordinasi dengan puskesmas setempat. Di tengah keterbatasan anggaran operasional, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengajak seluruh pemangku kepentingan, dunia usaha, dan masyarakat ikut bergotong royong membantu kebutuhan Liponsos.

"Kami membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berdonasi. Kehadiran dan gotong royong semua pihak sangat diperlukan agar pelayanan rehabilitasi ini dapat berjalan manusiawi," ujarnya.

Butuh gedung baru

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Tarkit Erdianto, mengemukakan pembangunan gedung baru menjadi solusi jangka panjang untuk memperbaiki pelayanan di Liponsos.

"Bangunan yang dipakai Liponsos itu masih pinjam. Makanya kita dorong bangun baru. Kita sudah ada lahan, beberapa tahun lalu sudah disiapkan. Kalau gak salah lokasinya berada di kawasan Tulangan," kata Tarkit, Selasa (7/7).

Apabila kebutuhan anggaran pembangunan cukup besar, Pemkab Sidoarjo dapat melakukan secara ber-



KURANG FASILITAS - Kondisi Liponsos Sidoarjo kurang beberapa fasilitas untuk penunjang orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan lanjut usia (lansia).

tahap. Perencanaan bisa dimulai melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini, kemudian pembangunan dilakukan pada tahun berikutnya.

"Kami beberapa kali berkunjung ke sana. Kondisi-nya memang tidak layak. Makanya, kita dorong eksekutif agar membangun gedung baru," tandas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Saat melakukan kunjung-

an ke Liponsos, sejumlah anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, berinisiatif urunan membeli beberapa perlengkapan untuk penghuni. Di antaranya televisi, sound system, dan kebutuhan lain agar fasilitas di tempat tersebut lebih baik.

Selain sarana dan prasarana, persoalan lain yang menjadi perhatian adalah sistem permakanan penghuni Liponsos. (u8)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Bupati Sidoarjo Pimpin Rakor Forkopimda, Tekankan Stabilitas Daerah dan Sukseskan Program MBG



metrocakrawala.id || **SIDOARJO** – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Tim Pemantauan Perkembangan Politik, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (7/7/2026). Rakor yang dipimpin langsung Bupati Sidoarjo H. Subandi tersebut membahas penguatan stabilitas daerah sebagai fondasi utama dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati Subandi menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga menjaga ketertiban, memperkuat ketahanan sosial, serta membangun keharmonisan di tengah masyarakat. Menurutnya, posisi strategis Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Jawa Timur menuntut sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah.

Pada kesempatan tersebut, Subandi juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai keberhasilan program tersebut memerlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar kualitas, keamanan pangan, dan ketepatan sasaran dapat terjamin. Sebagai langkah konkret, Pemkab Sidoarjo akan mengintegrasikan Program Kawasan Mandiri Pangan (KMP) di tingkat desa dan kelurahan sebagai pendukung pelaksanaan MBG. Program ini diharapkan mampu menyuplai bahan pangan lokal sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Bupati Subandi juga meminta agar program ketahanan pangan daerah diprioritaskan pada pemenuhan tiga kebutuhan pokok masyarakat, yakni beras, gula, dan minyak. Menurutnya, ketersediaan komoditas tersebut harus mampu meringankan beban ekonomi warga.

Di akhir arahannya, Subandi mengajak seluruh jajaran Forkopimda, DPRD, perangkat daerah, serta seluruh komponen masyarakat untuk terus menjaga stabilitas daerah demi mewujudkan Sidoarjo yang aman, sejahtera, maju, dan berdaya saling.

"Pastikan setiap kebijakan bermuara pada kesejahteraan masyarakat dan masa depan generasi penerus bangsa," tegasnya





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo Kawal Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur



pena-indonesia.com – Sidoarjo. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, M Dhamroni Chudhori akan mengawal terus kasus kekerasan seksual yang menimpa anak di bawah umur agar berjalan transparan dan berkeadilan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, M. Dhamroni Chudhori ketika duduk bersama di ruang rapat paripurna menemui perwakilan puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Sidoarjo Anti Predator Seks yang sedang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, Senin (6/7/2026). Aksi ini dilaksanakan berawal dari lambatnya penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yang diduga melibatkan seorang ketua padepokan sebuah pondok di kawasan Sidokare Kecamatan Sidoarjo. Massa melakukan aksinya di depan gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk menyuarakan tuntutan mereka. Kuasa hukum korban, Muhamad Subur menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Sidoarjo. Meskipun status dukun cabut dalam kasus ini sudah naik ke tingkat penyidikan, pihak kepolisian hingga kini juga belum menangkap maupun menahan diduga pelaku. "Kami menyangkan lambatnya penanganan kasus ini. Ada informasi pelaku sudah melarikan diri, tapi penyidik tidak segera menetapkan statusnya sebagai Dugaan Pencarian Orang (DPO)," ungkap Muhamad Subur. Lanjut Subur, jika kepolisian atau penyidik PPA Polresta Sidoarjo tidak mengambil tindakan tegas secepatnya, dikhawatirkan pelaku yang masih bebas berkolaborasi dapat melakukan perbuatan serupa kepada korban lainnya. Di tengah isu pelariannya, pelaku justru diketahui mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo meskipun belum status tahanan. "Pengajuan praperadilan ini unik, karena belum ada proses penahanan tersangka tetapi sudah ada pengajuan keberatan di pengadilan negeri," tambahnya. Ketika dalam pertemuan di hadapan perwakilan massa dan kuasa hukum korban, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo M. Dhamroni Chudhori menyampaikan pihak legislatif memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan seksual, yang menimpa korban anak di bawah umur. "Kami dari DPRD Kabupaten Sidoarjo berkomitmen akan mengawal kasus ini agar berjalan transparan dan berkeadilan," tegasnya. Sementara itu Ainun Amalia, S.Sos selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sidoarjo, yang turut hadir menyambut puluhan massa menyampaikan ini adalah pelecehan seksual yang sudah viral sejak lama. Mungkin dalam hal ini korban belum ke dinas kita sehingga ada komunikasi yang terputus. Tadi sudah kita anahkan ibu korban dan juga korban untuk bisa berkoordinasi dengan dinas PSAKB supaya pelaporan beliau ke Polres, kita bisa mendampingi sejauh mana pelaporan ini ditindaklanjuti. Sejahter mana proses dan prosedur di Polres ini bisa tersambung ke keluarga korban sampai di mana. Kemudian keuangannya jika berkoordinasi dengan dinas kami, kami juga bisa melakukan penjangkauan sampai ke tingkat korban. "Jangan sampai korban ini depresi, saya yakin korban sudah depresi dan orang tuanya sudah terlekan sehingga tidak punya solusi terhadap korban. Jika korban sampai melakukan hal – hal yang tidak kita inginkan maka kita semua yang menyesal termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Lanjut Ainun, kita punya dinas PSAKB yang berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan masyarakat dari predator – predator seksual yang tidak bertanggungjawab seperti ini harus kita musnahkan dari Sidoarjo. "Saya yakin Bupati dan Wakil Bupati pasti mendukung proses kami untuk mencari keadilan bagi adik-adik kami yang menjadi korban orang-orang yang bidadap seperti Kastari ini," pungkas Ainun.(Tit)

